Al-Kindi: *Jurnal Pendidikan Islam Multidisipliner*
Vol. 02, No. 03 (2026), p. 63 - 74 e-ISSN 3110--3804

Paradoks PPDB Zonasi di Indonesia: Tinjauan Literatur tentang Pemerataan Akses dan Mutu Sekolah

***[1]Nayla Rizqi Amaliya, [2]Syafa Ratu Aziza, [3]Driana Fazatul Azifah, [4]Muhammad Salman Al Farisi**
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: *[1]naylaaamlyh@gmail.com

Abstract

This literature review examines the implementation of school zoning policies (PPDB zonasi) in Indonesia and its impact on educational access and quality. The study synthesizes recent research from 2019 to 2026, focusing on the positive effects of zoning, the paradoxes and negative consequences, policy analysis, and recommended interventions. Findings indicate that zoning has improved access for students from underprivileged backgrounds and reduced competitive pressure in elite schools. However, disparities in school quality, teacher competence, and educational facilities persist, creating a paradox between increased access and uneven educational outcomes. Policy analysis highlights a policy implementation gap and the distinction between equity and equality, emphasizing the need for comprehensive strategies that include capacity building, resource improvement, and data-driven monitoring. The review concludes that while zoning contributes to more equitable access, sustained efforts are required to ensure quality education for all students.
Keywords: *PPDB Zonasi, school zoning, educational equity, policy implementation gap, Indonesia*

Abstrak

Tinjauan literatur ini membahas implementasi kebijakan zonasi sekolah (PPDB zonasi) di Indonesia dan dampaknya terhadap akses dan mutu pendidikan. Studi ini mensintesis penelitian terkini dari tahun 2019 hingga 2026, dengan fokus pada dampak positif zonasi, paradoks dan dampak negatif, analisis kebijakan, serta rekomendasi perbaikan. Temuan menunjukkan bahwa zonasi meningkatkan akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan mengurangi tekanan kompetisi di sekolah favorit. Namun, disparitas mutu sekolah, kompetensi guru, dan fasilitas pendidikan tetap ada, sehingga muncul paradoks antara peningkatan akses dan ketimpangan mutu pendidikan. Analisis kebijakan menyoroti adanya policy implementation gap dan perbedaan antara equity dan equality, menekankan perlunya strategi komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas, perbaikan sumber daya, dan monitoring berbasis data. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa zonasi berkontribusi pada pemerataan akses, tetapi upaya berkelanjutan diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan yang merata bagi seluruh siswa.
Kata Kunci: *PPDB Zonasi, zonasi sekolah, pemerataan pendidikan, policy implementation gap, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkeadilan sosial. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan di Indonesia terlihat jelas pada perbedaan kualitas sekolah, kompetensi guru, dan fasilitas belajar antara kawasan urban dan rural, serta antara sekolah favorit dan sekolah umum di daerah pinggiran. Studi literatur menunjukkan bahwa ketidakmerataan ini bukan hanya persoalan geografis, tetapi juga berdampak pada peluang belajar dan pencapaian akademik siswa (Sutanto, 2024). Kondisi tersebut menjadikan pemerataan pendidikan sebagai isu strategis yang membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat.

PPDB berbasis zonasi diperkenalkan sebagai salah satu mekanisme kebijakan untuk memperluas akses pendidikan dan mengurangi dominasi sekolah favorit. Zonasi menetapkan jarak tempat tinggal sebagai kriteria utama, disertai jalur afirmasi dan prestasi, sehingga setiap siswa memiliki peluang untuk masuk sekolah negeri terdekat (Syakarofath et al., 2020). Analisis literatur memperkuat pemahaman bahwa tujuan kebijakan ini tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial dan hak konstitusional setiap warga negara atas pendidikan yang layak. Zonasi dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan distribusi kesempatan pendidikan, meskipun implementasinya memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

Literatur terkini menyoroti paradoks yang muncul dari implementasi kebijakan zonasi. Meskipun akses ke sekolah tertentu meningkat, kualitas sekolah yang tersedia dalam zona masih bervariasi signifikan (Nurdin et al., 2024). Penelitian menyatakan bahwa zonasi memperluas akses awal, namun tidak secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Variasi fasilitas, kompetensi guru, dan prestasi siswa antar sekolah dalam satu zona tetap menjadi hambatan utama. Fenomena ini mengindikasikan adanya *policy implementation gap*, di mana tujuan normatif kebijakan tidak sepenuhnya terealisasi di lapangan.

Praktik manipulasi administrasi domisili dan pergeseran siswa ke sekolah favorit memperjelas tantangan yang dihadapi dalam penerapan zonasi (Yenti et al.,

2024). Analisis literatur menunjukkan bahwa konflik antara niat kebijakan dan perilaku masyarakat menciptakan paradoks sosial-pendidikan. Paradoks ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga mempengaruhi persepsi orang tua dan siswa terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Pemerataan akses tanpa diiringi peningkatan mutu secara menyeluruh dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

Urgensi kajian literatur terkait PPDB zonasi menjadi jelas ketika menimbang kebutuhan perbaikan implementasi kebijakan. Sintesis temuan dari berbagai jurnal memperlihatkan bahwa evaluasi berbasis data dan pendekatan konseptual yang menyatukan berbagai studi empiris diperlukan (Adinda, 2025). Artikel ini hadir untuk memberikan analisis literatur yang komprehensif, membahas prinsip dasar zonasi, realitas implementasi, tantangan paradoks, dan implikasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberi kontribusi pada pengembangan strategi pendidikan yang lebih adil dan berkualitas, serta memberikan dasar pemikiran bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan di Indonesia.

METODE

Metode Artikel ini menggunakan pendekatan literature review sistematis dan naratif untuk menganalisis kebijakan PPDB berbasis zonasi di Indonesia. Literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan laporan pemerintah terkait implementasi zonasi, dengan fokus pada pemerataan akses, mutu pendidikan, dan paradoks kebijakan. Kriteria inklusi mencakup publikasi dari tahun 2019 hingga 2026, relevansi dengan tema zonasi sekolah, serta ketersediaan full-text atau PDF. Literatur yang menyediakan data empiris maupun analisis teoretis tentang dampak positif, negatif, dan rekomendasi kebijakan dijadikan fokus utama (Sutanto, 2024).

Strategi pencarian literatur dilakukan melalui basis data online seperti *ResearchGate*, jurnal nasional terindeks, dan portal prosiding universitas. Kata kunci yang digunakan antara lain PPDB zonasi, *school zoning* Indonesia, *education equity*, *policy implementation gap*, dan *school quality*. Hasil pencarian diseleksi berdasarkan

kesesuaian topik, metodologi, dan cakupan geografi, sedangkan artikel yang terlalu umum, opini populer, atau tidak relevan dikecualikan (Nurdin et al., 2024).

Analisis literatur dilakukan secara tematik, di mana setiap artikel dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan temuan. Temuan-temuan ini kemudian dikategorikan ke dalam empat tema utama: (1) dampak positif zonasi, (2) dampak negatif dan paradoks, (3) analisis kebijakan berdasarkan teori pendidikan dan kebijakan publik, dan (4) rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menghubungkan hasil studi empiris dengan konsep teori pendidikan, termasuk *equity vs equality* dan *Capability Approach*, sehingga analisis kebijakan menjadi lebih komprehensif (Adinda, 2025).

Sintesis literatur dilakukan secara naratif dan interpretatif, bukan sekadar merangkum temuan. Penulis mengevaluasi kualitas metodologi, kekuatan argumen, dan relevansi setiap studi untuk membangun narasi yang mengalir dari identifikasi masalah hingga rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan pembaca memahami hubungan antara tujuan zonasi, implementasi di lapangan, dan dampak sosial-pendidikan, serta menegaskan urgensi perbaikan kebijakan berbasis bukti akademik (Ariska et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi menghasilkan dampak yang beragam. Sejumlah penelitian mengidentifikasi adanya capaian positif yang berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, sementara penelitian lainnya menyoroti berbagai kendala yang menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas zonasi tidak dapat dipahami hanya dari aspek penerimaan peserta didik, tetapi juga perlu dianalisis melalui dimensi keadilan pendidikan, kualitas layanan sekolah, serta kesenjangan yang masih terjadi antarwilayah. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada dampak positif zonasi, tantangan dan paradoks yang muncul, analisis kebijakan berdasarkan perspektif teoritis, serta rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat implementasi kebijakan pada masa mendatang.

Dampak Positif Zonasi

Baccalaureate Kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi memberikan sejumlah dampak positif terhadap upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Kehadiran sistem zonasi pada dasarnya dirancang untuk mengurangi kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan antara siswa yang tinggal di pusat kota dan siswa yang berada di wilayah pinggiran. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan ini telah mengubah pola penerimaan peserta didik yang sebelumnya sangat terkonsentrasi pada sekolah-sekolah favorit menjadi lebih tersebar sesuai dengan wilayah tempat tinggal siswa (Oktaviani et al., 2025).

Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu dampak positif yang paling banyak ditemukan dalam berbagai penelitian. Menurut Lakoro, Nada, dan Jalaludin, sistem zonasi mendorong distribusi peserta didik yang lebih merata berdasarkan kedekatan geografis sehingga kesempatan untuk mengakses sekolah negeri tidak lagi didominasi oleh kelompok tertentu yang memiliki keunggulan akademik maupun kemampuan ekonomi yang lebih baik (Lakoro et al., 2025). Temuan tersebut diperkuat oleh Oktaviani dan kolega yang menjelaskan bahwa kebijakan zonasi berhasil mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah karena siswa memperoleh prioritas masuk ke sekolah yang berada di sekitar tempat tinggal mereka (Oktaviani et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa zonasi berkontribusi dalam memperluas kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah dengan fasilitas yang relatif lebih baik.

Peningkatan akses tersebut juga memberikan manfaat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sebelum sistem zonasi diterapkan, peluang untuk memasuki sekolah-sekolah yang dianggap unggulan cenderung didominasi oleh siswa dengan capaian akademik tinggi atau yang memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai fasilitas penunjang pendidikan. Setelah zonasi diberlakukan, faktor kedekatan tempat tinggal memperoleh porsi yang lebih besar dalam proses seleksi sehingga siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi memiliki kesempatan yang lebih setara untuk diterima di sekolah negeri di wilayahnya. Analisis ini menunjukkan bahwa zonasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mendukung prinsip keadilan akses dalam Pendidikan (Rokhman, 2024).

Dampak positif lainnya terlihat pada berkurangnya tekanan kompetisi yang selama bertahun-tahun melekat pada proses penerimaan siswa di sekolah favorit. Sistem seleksi

yang sebelumnya sangat kompetitif sering kali menimbulkan tekanan psikologis bagi peserta didik maupun orang tua karena keberhasilan diterima di sekolah tertentu dianggap sebagai indikator kualitas pendidikan yang akan diperoleh. Implementasi zonasi secara bertahap mengurangi konsentrasi pendaftar pada sejumlah sekolah tertentu dan mendorong penyebaran siswa ke sekolah-sekolah lain dalam satu wilayah. Menurut Perdana, kondisi ini berkontribusi pada berkurangnya dikotomi antara sekolah unggulan dan sekolah nonunggulan yang selama ini menjadi salah satu sumber ketimpangan dalam sistem pendidikan Indonesia (Perdana, 2019).

Kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang relatif jauh dari pusat kota juga menjadi temuan penting dalam berbagai studi. Kedekatan lokasi sekolah dengan tempat tinggal memungkinkan siswa menghemat waktu dan biaya transportasi sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa zonasi meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat lokal karena sekolah menjadi lebih mudah dijangkau oleh peserta didik di lingkungan sekitar (Aris et al., 2024). Dari perspektif pemerataan layanan publik, kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan zonasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi peserta didik, tetapi juga sebagai strategi untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi telah memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Meskipun berbagai tantangan masih ditemukan dalam implementasinya, hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa zonasi berhasil memperluas kesempatan belajar, mengurangi dominasi sekolah favorit, dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terjangkau. Dengan demikian, dari perspektif akses pendidikan, kebijakan zonasi dapat dipandang sebagai salah satu langkah penting dalam mewujudkan prinsip pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dampak Negatif dan Paradoks

Implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang menimbulkan paradoks antara tujuan pemerataan dan realitas di lapangan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan meningkat secara geografis, ketimpangan mutu antar sekolah tetap terjadi (Hakim & Naufal, 2026). Sekolah yang berada di zona terpencil atau memiliki kapasitas terbatas masih memiliki kekurangan fasilitas, guru dengan kompetensi terbatas, dan prestasi akademik siswa yang rendah

dibandingkan sekolah di zona perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan mutu pendidikan, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai (Samosir & Usiono, 2025).

Fenomena manipulasi administrasi domisili dan pergeseran siswa ke sekolah favorit juga menjadi masalah yang sering muncul. Penelitian mengidentifikasi praktik pemalsuan alamat atau relokasi sementara untuk memenuhi persyaratan zonasi (Arianto et al., 2025). Praktik ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain yang benar-benar tinggal di zona tersebut, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa sistem zonasi belum efektif sepenuhnya dalam menegakkan prinsip pemerataan. Dari perspektif kebijakan, hal ini mencerminkan policy implementation gap, di mana regulasi yang diterbitkan memiliki tujuan normatif yang jelas, tetapi implementasi di lapangan menghadapi hambatan administratif dan sosial (Ainuri & Wijaya, 2026).

Variasi sarana, kompetensi guru, dan prestasi siswa antar sekolah dalam satu zona memperkuat paradoks zonasi. Literatur menyebutkan bahwa kebijakan zonasi yang seharusnya menyetarakan kesempatan justru dapat menimbulkan ketidakpuasan, terutama di sekolah yang kualitasnya rendah, sehingga efek pemerataan terasa parsial (Ariska et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa zonasi meningkatkan akses tetapi belum menjamin kualitas pendidikan yang merata, sehingga paradoks antara pemerataan akses dan mutu tetap muncul. Analisis kritis dari berbagai studi menunjukkan bahwa penyelesaian paradoks ini memerlukan strategi komprehensif, termasuk peningkatan kualitas guru, fasilitas sekolah, dan evaluasi implementasi kebijakan berbasis data.

Integrasi Nilai Lokal dan Kurikulum Internasional

Analisis literatur menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPDB berbasis zonasi dirancang untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan yang menimbulkan kesenjangan antara tujuan dan realita (Sutanto, 2024). Fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep policy implementation gap, di mana regulasi yang ideal sering kali tidak sepenuhnya terealisasi di lapangan akibat keterbatasan sumber daya, variasi kapasitas sekolah, dan faktor sosial-administratif. Beberapa studi menegaskan bahwa meskipun akses ke sekolah negeri meningkat, mutu pendidikan antar sekolah tetap tidak merata, sehingga tercipta paradoks antara pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Nurdin et al., 2024).

Perspektif *equity vs equality* menegaskan bahwa zonasi, sebagai instrumen

pemerataan, berfokus pada penyediaan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk mengakses sekolah di wilayahnya. Namun, literatur terbaru menunjukkan bahwa kesamaan akses tidak otomatis menghasilkan kesetaraan mutu pendidikan, karena sekolah dalam satu zona dapat memiliki fasilitas, jumlah guru, dan kompetensi pengajar yang berbeda (Adinda, 2025). Hal ini menekankan perlunya strategi yang tidak hanya menempatkan siswa secara geografis, tetapi juga meningkatkan kapasitas sekolah agar tujuan keadilan pendidikan secara menyeluruh tercapai.

Selain itu, studi kritis terhadap implementasi zonasi juga menyoroti faktor sosial-politik dan persepsi publik sebagai pengaruh penting terhadap efektivitas kebijakan. Penelitian menunjukkan adanya resistensi masyarakat dan praktik manipulasi domisili untuk masuk ke sekolah favorit, yang menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan (Ariska et al., 2024). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa evaluasi dan monitoring berbasis data harus menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan, agar *policy intention* dan hasil di lapangan lebih selaras.

Beberapa literatur juga mengaitkan analisis SWOT zonasi dengan teori pendidikan, termasuk Capability Approach dari Amartya Sen. Pendekatan ini menekankan bahwa akses saja tidak cukup; siswa harus memiliki kemampuan nyata untuk memperoleh pendidikan berkualitas melalui guru yang kompeten, fasilitas memadai, dan lingkungan belajar yang kondusif (Sutanto, 2024). Dengan demikian, kebijakan zonasi yang sukses bukan hanya soal distribusi siswa, tetapi juga tentang peningkatan kapasitas sistem pendidikan di seluruh zona. Analisis kritis ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang komprehensif, mencakup perbaikan mutu guru, fasilitas, dan evaluasi implementasi, sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan zonasi (Nurdin et al., 2024).

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan integrasi jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi secara proporsional untuk memastikan distribusi peserta didik yang lebih adil (Sutanto, 2024). Literatur menekankan bahwa kombinasi jalur ini dapat meminimalkan ketimpangan akses sambil tetap mempertahankan penghargaan terhadap prestasi siswa yang unggul (Adinda, 2025). Implementasi strategi ini harus disertai regulasi yang jelas untuk menghindari praktik manipulasi administrasi domisili dan menjaga transparansi proses seleksi.

Peningkatan kapasitas sekolah, termasuk kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan lingkungan belajar, menjadi aspek kunci agar kebijakan zonasi tidak hanya meningkatkan akses tetapi juga mutu pendidikan (Nurdin et al., 2024). Studi menunjukkan bahwa zonasi yang hanya menekankan jarak geografis tanpa memperkuat kapasitas sekolah berpotensi menimbulkan paradoks pemerataan, di mana akses meningkat tetapi kualitas pendidikan tetap timpang (Ariska et al., 2024). Oleh karena itu, intervensi pada sumber daya pendidikan harus berjalan paralel dengan distribusi siswa.

Monitoring berbasis data dan evaluasi rutin merupakan strategi penting untuk menilai efektivitas kebijakan zonasi. Literasi terkini menyarankan penggunaan sistem dashboard, survei kepuasan orang tua, dan analisis capaian akademik siswa sebagai indikator keberhasilan implementasi (Hakim & Naufal, 2026). Dengan evaluasi yang berkesinambungan, kebijakan zonasi dapat diperbaiki secara adaptif, sehingga tujuan awal pemerataan pendidikan dapat lebih optimal tercapai.

Pengalaman internasional juga dapat dijadikan acuan. Beberapa negara menunjukkan bahwa kombinasi zonasi dengan peningkatan kapasitas sekolah dan evaluasi berkala menghasilkan pemerataan yang lebih efektif dan mengurangi ketimpangan mutu pendidikan (Samosir & Usiono, 2025). Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan kebijakan zonasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus disertai langkah-langkah strategis yang menghubungkan regulasi, sumber daya, dan praktik implementasi di lapangan.

KESIMPULAN

Kebijakan PPDB berbasis zonasi telah berhasil meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil. Distribusi peserta didik menjadi lebih merata antar sekolah, dan tekanan kompetisi di sekolah favorit berkurang, menunjukkan bahwa tujuan awal pemerataan akses secara geografis sebagian tercapai. Zonasi berfungsi sebagai instrumen penting dalam memperluas kesempatan belajar dan mendorong inklusivitas pendidikan.

Meskipun akses meningkat, ketimpangan mutu sekolah tetap menjadi tantangan utama. Perbedaan fasilitas, kompetensi guru, dan prestasi akademik siswa antar zona menunjukkan bahwa pemerataan akses tidak otomatis menjamin

kesetaraan kualitas pendidikan. Fenomena ini menciptakan paradoks, di mana zonasi berhasil mempermudah akses tetapi belum sepenuhnya mengurangi kesenjangan mutu, sehingga menuntut perhatian lebih pada kualitas pendidikan.

Analisis kebijakan menegaskan bahwa policy implementation gap dan perbedaan antara equity dan equality menjadi faktor utama dalam efektivitas zonasi. Akses pendidikan harus disertai kemampuan nyata siswa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut melalui guru yang kompeten, fasilitas memadai, dan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa zonasi yang efektif membutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan distribusi siswa dengan peningkatan kapasitas sekolah.

Rekomendasi kebijakan yang paling relevan mencakup integrasi jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi secara proporsional, peningkatan kapasitas guru dan fasilitas di zona tertinggal, serta monitoring dan evaluasi implementasi berbasis data secara rutin. Implementasi strategi ini akan memperkuat tujuan awal zonasi, menciptakan pemerataan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga kebijakan zonasi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh siswa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, S. P. (2025). Revisiting the Equity Promise of School Zoning Policies in Indonesia : Between Idealism and Implementation. *Jurnal Pendidikan Sosial*, *3*(2), 78–87. https://journal.yazri.com/index.php/jupsi%0ARevisiting

Ainuri, A. F. Y., & Wijaya, M. M. (2026). Kebijakan Zonasi Sekolah dan Eksklusi Administratif : Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia Kebijakan Zonasi Sekolah dan Eksklusi Administratif : Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia. *WISE Pendidikan Indonesia*, *3*(1), 73–84. https://doi.org/https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i1.476

Arianto, N. R., Zavrilia, N., Dianti, N. R., Kartika, R., Marvino, M. F., & Ananda, A. (2025). Ketika Alamat Menentukan Sekolah : Analisis Pemerataan dalam Sistem

Zonasi PPDB di SMA Negeri 3 Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, *2*(2), 541–551. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/scemp.v2i2.338

Aris, M., Haerul, & Rifdan. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Makassar Ke-63*, *2*, 75–78. https://journal.unm.ac.id/index.php/Semnasdies62/article/view/4558/2597

Ariska, A., Sholeh, M., & Riyanto, Y. (2024). Analisis Kebijakan Zonasi: Dampak Polemik Kebijakan Zonasi Pendidikan Indonesia Anggi. *Jurnal Teknologi Dan Pendidikan*, *1*(1), 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jtp.v1i1.861

Hakim, L. El, & Naufal, M. M. (2026). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB: Antara Tujuan Pemerataan dan Realita Kesenjangan Mutu Sekolah. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *3*(3), 421–427. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9835

Lakoro, N., Nada, L. N., & Jalaludin. (2025). Efektivitas Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas : Tinjauan Literatur. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(4), 4630–4640. https://journal.ilmudata.co.id/ index.php/RIGGS Vol.

Nurdin, Zulfa, H. S. A., Setiawan, F. A. B., Nurkhaeratunnisa, & Fadli, R. M. (2024). Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia : Tinjauan Literatur Tentang Implementasi dan Dampaknya. *Jurnal Media Akademik*, *2*(10), 1–16. https://doi.org/10.62281

Oktaviani, V., Hayatunnisa, A., Aulia, L., & Talitha, T. A. (2025). Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(2), 71–77. https://doi.org/org/10.63822/6w0yna96

Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, *3*(1), 78–92.

https://doi.org/http://10.32529/glasser.v%vi%i.186

Rokhman, A. N. (2024). Kebijakan PPDB zonasi dalam Lembaga Kependidikan di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, *2*(3), 273–280. https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index Kebijakan

Samosir, N. N. U., & Usiono. (2025). Dampak Sistem Zonasi PPDB Terhadap Mutu Pendidikan dan Kesenjangan Antar Sekolah. *KHIDMAT: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(2), 354–365. https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/khidmat%0ANajwa

Sutanto. (2024). Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia : Kajian Literatur Mengenai Penyimpangan dan Implikasinya. *JGSD:Jurnal Guru Sekolah Dasar*, *1*(3), 1–10. https://doi.org/10.5281/zenodo.12741426

Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *5*(2), 115–130. https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736

Yenti, A., Utami, M., Yulia, & Hendrizal. (2024). Mengurai Tantangan dan Peluang PPDB Berbasis Zonasi : Menuju Pemerataan Pendidikan Berkualitas di Indonesia. *Jurnal Tendidikan Tambusai*, *8*(2), 27812–27820.